

## BAB II

### DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Profil Wilayah Kabupaten Lumajang

##### 1. Letak dan Luas Wilayah

Secara geografis, Pemerintah Kabupaten Lumajang terletak antara  $112^{\circ}50'$ - $113^{\circ}22'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}52'$  -  $8^{\circ}23'$  Lintang Selatan. Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 (dua puluh satu) kecamatan yaitu : Yosowilangun, Kunir, Tempeh, Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, Tempursari, Rowokangkung, Tekung, Lumajang, Sumbersuko, Sukodono, Senduro, Pasrujambe, Padang, Guciliat, Jatirojo, Randuagung, Kedungjajang, Klakah dan Ranusoyo, Adapun batas – batas administrasi Kabupaten Lumajang sebagai berikut<sup>1</sup> :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jember
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malang

---

<sup>1</sup> RPJMD Kabupaten Lumajang 2015-2019 hal II-2

**Gambar 2.1**  
Peta Administrasi Kabupaten Lumajang



**Tabel 2.1**

*Tabel Luas dan Prosentase Luasan Perkecamatan Kabupaten Lumajang*

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Prosentase (%)
1	Tempursari	101.36	5.66
2	Pronojiwo	38.74	2.16
3	Candipuro	144.93	8.09
4	Pasirian	183.91	10.27
5	Tempeh	88.05	4.92
6	Lumajang	30.26	1.69
7	Sumbersuko	26.54	1.48
8	Tekung	30.40	1.70
9	Kunir	50.18	2.80
10	Yosowilangun	81.30	4.54

11	Rowokangkung	77.95	4.35
12	Jatiroto	77.06	4.30
13	Randuagung	103.41	5.77
14	Sukodono	30.79	1.72
15	Padang	52.79	2.95
16	Pasrujambe	97.30	5.43
17	Senduro	228.68	12.77
18	Gucialid	72.83	4.07
19	Kedungjajang	92.33	5.16
20	Kelakah	83.67	4.67
21	Ranuyoso	98.42	5.50
22	Jumlah	1,790.90	100.00

*Sumber: BPS kabupaten Lumajang tahun 2014*

## 2. Demografi Kabupaten Lumajang

Jumlah penduduk Kabupaten Lumajang tahun 2014 sebanyak 1.086.669 jiwa, terdiri dari laki laki sebesar 528.129 jiwa dan perempuan 558.540 jiwa. Dari sisi kepadatan penduduk, Kabupaten Lumajang tingkat kepadatan penduduk rata-rata adalah 695 jiwa/km<sup>2</sup>. Apabila dilihat dari tingkat kepadatan penduduk perkecamatan, kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah Kecamatan Lumajang (3.123 jiwa/km<sup>2</sup>), diikuti dengan Kecamatan Sukodono (1.793 jiwa/km<sup>2</sup>) dan Kecamatan Sumbersuko (1.369 jiwa/km<sup>2</sup>). *Sex Ratio* merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan dikalikan 100. Pada tahun 2014 setiap 100 penduduk perempuan di Indonesia terdapat 98 penduduk laki-laki.

Dalam kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2014 pertumbuhan penduduk Kabupaten Lumajang tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 1.292 jiwa atau 0,19 persen<sup>2</sup>.

**Tabel 2.2**

*Jumlah Penduduk Kabupaten Lumajang Menurut Jenis Kelamin, Kepadatan dan Rasio Seks Tahun 2015*

No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah	Luas Area	Kepadatan	Jumlah KK
		Laki-Laki	Perempuan		KM2		
1	Tempursari	15,424	16,717	32,141	101.36	317	9993
2	Pronojiwo	17,89	19,156	37,046	38.74	956	11111
3	Candipuro	34,337	35,789	70,126	144.93	484	21765
4	Pasirian	41,583	43,47	85,053	183.91	462	25990
5	Tempeh	39,801	41,029	80,83	88.05	918	24475
6	Kunir	26,201	27,769	53,97	50.18	1,076	16910
7	Yosowilangun	30,016	31,305	61,321	81.30	754	20033
8	Rowokangkung	17,958	19,499	37,457	77.95	481	12131
9	Tekung	16,769	18,079	34,848	30.40	1,146	10814
10	Lumajang	43,117	44,329	87,446	30.26	2,89	27610
11	Pasrujambe	19,62	20,832	40,452	97.30	416	11380
12	Senduro	22,879	24,061	46,94	228.68	205	14162
13	Gucialid	11,916	13,602	25,518	72.83	350	7655
14	Padang	17,183	18,941	36,124	52.79	684	10872
15	Sukodono	25,862	27,207	53,069	30.79	1,724	15926
16	Kedungjajang	21,062	23,239	44,301	92.33	480	12829
17	Jatiroto	23,746	25,104	48,85	77.06	634	14874
18	Randuagung	31,717	32,814	64,531	103.41	624	19511

<sup>2</sup> Ibid hal II-7

19	Klakah	30,655	32,091	62,746	83.67	750	18399
20	Ranuyoso	23,725	25,096	48,821	98.42	496	13495
21	Sumbersuko	16,668	18,411	35,079	26.54	1,322	11077
JUMLAH		528,129	558,54	1086,669	1790.90	607	331012

*Sumber : Hasil Konsolidasi Database Kementerian Dalam Negeri*

Sebagai ibukota kabupaten, maka gejala urban bias tidak dapat dihindari di Kabupaten Lumajang. Pembangunan fisik dengan segala fasilitasnya tak terhindarkan lebih banyak bermunculan di Kecamatan Lumajang, dan beberapa tempat di Kecamatan Sukodono, sebagai tempat pemekaran keramaian di kota Lumajang. Bagi kalangan swasta di mana seluruh aktivitasnya lebih banyak yang berorientasi ekonomi, maka berbagai investasi yang ditanam memilih lokasi-lokasi yang menguntungkan, paling tidak memiliki potensi agar aktivitas usaha yang ditekuni dapat berjalan lancar dan mencapai kesuksesan. Kalangan pemodal akan mempertimbangkan lokasi-lokasi yang dinilai telah memiliki atau berpotensi untuk dilakukan pembangunan sarana dan prasarana memadai guna mendukung usahanya<sup>3</sup>.

Kecamatan Lumajang sebagai ibukota kabupaten tentu lebih memberikan peluang dan menawarkan sejumlah fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan ekonomi para investor dan pelaku ekonomi. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan jika berbagai aktivitas yang dilakukan oleh para pemodal dan investor yang terpusat di ibukota

---

<sup>3</sup> Ibid hal II-8

kecamatan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk untuk melakukan migrasi ke Kecamatan Lumajang.

### 3. Penggunaan Lahan Dan Kawasan Budidaya Kabupaten

#### Lumajang

Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Lumajang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung di kabupaten Lumajang meliputi Hutan Lindung dan Taman nasional dengan seluas 35.067,05 Ha atau sekitar 19,58 %, sedangkan kawasan budi daya seluas 144.022,95 Ha atau sekitar 80,42% meliputi Hutan Produksi, Hutan Rakyat, Pemukiman, Lahan Pertanian, Lahan Perkebunan Perikanan darat (tambak, kolam, empang) serta sungai perairan.

**Tabel 2.3**

*Penggunaan lahan dan kawasan budidaya*

<b>Peruntukan</b>	<b>Luas Ha</b>
Kawasan Hutan Lindung	11.527,60
Taman Nasional	23.539,45
Kawasan Hutan Produksi	22.735,00
Kawasan Hutan Rakyat	56.436,00
<b>Total Luasan Hutan :</b>	<b>114.238,05</b>
<b>Penggunaan Lain :</b>	<b>64.851,95</b>
- Pemukiman	15.927,00
- Lahan Pertanian	35.993,00
- Lahan Perkebunan	9.921,00
- Perikanan (tambak, kolam, empang)	127,00
- Sungai dan perairan	2.883,95

*Sumber : RTRW Kab.Lumajang Tahun 2012-2032*

#### 4. Aspek Kehutanan Kabupaten Lumajang

Untuk mengurangi tingkat kerusakan lahan di Kabupaten Lumajang selama tahun 2013 telah diadakan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan, seluas 19.771,32 hektar yang terdiri dari penambahan hutan rakyat seluas 297,00 hektar, pengkayaan dan pemeliharaan hutan rakyat 978,50 hektar, penghijauan untuk penyelamatan sumber mata air dan kanan kiri sungau 2,00 hektar, reboisasi dalam kawasan hutan Perum Perhutani dan TNBTS 118,40 hektar, penghijauan untuk penggantian tebangan 8.095,02 hektar dan penghijauan lingkungan seluas 10.280,41 hektar meliputi tanaman mahoni, sengon, jati, jabon, suren, tanaman perkebunan, dan MPTS<sup>4</sup>.

Dalam hal penataan hasil hutan di Kabupaten Lumajang telah dilaksanakan dengan baik. Namun, dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya diperoleh dari sumbangan pihak ke III berupa pelayanan SKSKB-KR, FAKO dan Surat Ijin Penebangan Pohon (SIPP) tidak dianggarkan dalam DPA SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang Tahun 2015<sup>5</sup>.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil hutan yang berasal dari hutan hak, sudah tidak diperlukan lagi dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat Kayu Rakyat (SKSKB-KR) dan surat ijin

---

<sup>4</sup> Ibid hal II-60

<sup>5</sup> Ibid hal II-63

penebangan pohon. Sedangkan kewenangan untuk menerbitkan Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) diberikan kepada pihak Kepala Desa. Meskipun sudah tidak ditargetkan adanya PAD namun sumbangan Pihak ke- 3 tetap diterima melalui rekening Kas Daerah. PAD yang berasal dari bagi hasil Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 494.753.970,- (Empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah). Hasil implementasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 mampu mendukung hasil produksi kehutanan mengingat luas daratan Kabupaten Lumajang sekitar 179.090 hektar memiliki potensi sumberdaya hutan rakyat seluas 66.936,69 hektar (hasil inventarisasi tegakan hutan rakyat tahun 2009)<sup>6</sup>.

Dari berbagai upaya yang dilakukan dalam pembangunan hutan rakyat baik melalui sumber dana pemerintah (APBN dan APBD Kabupaten) maupun swadaya masyarakat yang bertujuan sebagai upaya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hutan rakyat di Kabupaten Lumajang pada tahun 2015 seluas 57.310,00 hektar.

---

<sup>6</sup> Ibid II-65

**Tabel 2.4**  
*Perbandingan perkembangan luas hutan rakyat Tahun  
 2014-2015 Berdasarkan Lokasi/Kecamatan*

No	Lokasi	Jumlah (Ha)	
		Th 2014	2015
1	Tempursari	1.880,33	1.932,83
2	Pronojiwo	4.890,51	4,940,51
3	Candipuro	7.186,64	7.211,64
4	Pasirian	2.816,74	2.852,18
5	Tempeh	8.852,18	2.852,18
6	Lumajang	282,53	282,53
7	Sumbersuko	1.076,33	1.076,33
8	Tekung	454,15	454,15
9	Kunir	6.333,19	6.333,19
10	Yosowilangun	317,84	317,84
11	Rowokangkung	475,76	475,76
12	Jatiroto	141,28	141,28
13	Randuagung	1.636,84	1.651,84
14	Sukodono	143,50	143,50
15	Padang	1.730,62	1.730,62
16	Pasrujambe	2,859,81	2.889,81
17	Senduro	7.012,58	7.042,58
18	Gucialid	6.270,30	6.270,30
19	Kedungjajang	1.755,96	1.785,96
20	Klakah	2.837,08	2.844,58
21	Ranuyoso	4.058,83	4.096,33
	<b>Jumlah</b>	<b>57.013,00</b>	<b>57.310,00</b>

*Sumber : Dinas Kehutanan Kab. Lumajang Tahun 2013*

Realisasi produksi hasil hutan rakyat yang berhasil dicapai pada tahun 2015 sebanyak 1.052.352,23 m<sup>3</sup> kayu hutan atau naik sebesar 183 persen dari target sebesar 575.000 m<sup>3</sup> yang didominasi oleh tanaman sengon sebesar 1.031.676,31 m<sup>3</sup>, produksi dari kayu hutan jenis rimba campur sebesar 9.027,81 m<sup>3</sup>, mahoni sebesar 3.671,33 m<sup>3</sup>, Jati sebesar 3.037,90 m<sup>3</sup>, Kembang sebesar 2.371,92 m<sup>3</sup>, Damar sebesar 1.607,27 m<sup>3</sup>, Bendo sebesar 424,87 m<sup>3</sup>, Nyampo sebesar 294,68 m<sup>3</sup>, Sono sebesar 206,30 m<sup>3</sup> dan Pinus sebesar 33,86 m<sup>3</sup>. Dibandingkan dengan tahun 2012 produksi hasil hutan rakyat mengalami kenaikan sebesar 52,71 persen atau sebanyak 363.199,59 m<sup>3</sup>. Besarnya kenaikan ini salah satu faktornya adalah masyarakat dipermudah untuk menebang pohon di lahannya sendiri tanpa perlu Surat Ijin Penebangan Pohon (SIPP) sehingga menyebabkan kesulitan dalam pengendalian penebangan kayu yang berasal dari hutan rakyat. Hal ini berakibat pada tingginya produksi tahun 2013 sehingga melebihi taksiran tebangan maksimum yang menjamin kelestarian hutan di Kabupaten Lumajang yaitu sebesar 751.186,54 m<sup>3</sup>/tahun<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Ibid hal II-63

**Tabel 2.5***Peningkatan Produksi Hutan Tahun 2012-2013-2014*

<b>Jenis Kayu</b>	<b>Volume (M<sup>3</sup>)</b>		
	<b>Tahun 2012</b>	<b>Tahun 2013</b>	<b>Tahun 2014</b>
Jati	2.627,88	1.951,25	3.037,90
Mahoni	4.006,78	3.126,83	3.671,33
Sono	317,19	208,66	206,30
Damar	549,03	1.079,58	1.607,27
Pinus	577,28	29,53	33,86
Kembang	1.889,11	1.780,07	2.371,92
Bendo	344,82	264,02	424,87
Nyampo	291,97	209,04	294,68
Rimba campur	7.166,03	5.658,58	9.027,81
Sengon	659.899,01	674.845,07	1.031.676,31
<b>Jumlah</b>	<b>677.669,10</b>	<b>689.152,64</b>	<b>1.052.352,23</b>

*Sumber : Dinas Kabupaten Lumajang 2013*

Dalam hal pelayanan ijin pemanfaatan hasil hutan dan pemanfaatan kawasan hutan, mempunyai kewenangan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat lokal dengan mengacu pada acuan nasional dan memberikan pertimbangan teknis dan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat yang selanjutnya akan mempertimbangkan untuk memberi atau menolak usulan ijin tersebut. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30 Tahun 2014 yang mengatur tentang Penatausahaan hasil hutan yang

berasal dari hutan hak, Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Kehutanan tidak lagi mempunyai kewenangan dalam memberikan ijin pemanfaatan hasil hutan. Dokumen-dokumen yang diperlukan hanya SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) Kayu dan Nota Angkutan yang dapat diterbitkan oleh desa. Sedangkan FAKO dapat diterbitkan oleh perusahaan sendiri.

**Tabel 2.6**

No	Uraian	Th 2013		Th 2014		Th 2015	
		Lembar	M <sup>3</sup>	Lembar	M <sup>3</sup>	Lembar	M <sup>3</sup>
1	Jumlah Ijin/blangko yang dikeluarkan						
	•SKSKB-KR	991	7.071,69	NIHIL			
	•FAKO	11.836	639.081,12	25.539	1.379.134,463	115,77	115,77
	•SKAU	17.910	395.939,41	NIHIL			
2	penerbitan						
	•SIPP	472	689.152,64	NIHIL			

*Sumber : Dinas Kehutanan Kab. Lumajang Tahun 2013*

Potensi hutan rakyat yang cukup besar dari segi populasi pohon maupun jumlah rumah tangga yang mengusahakannya ternyata mampu menyediakan bahan baku industri kehutanan. Perkiraan potensi dan luas hutan rakyat yang dihimpun sampai dengan tahun 2013 mencapai 7.641.333 m<sup>3</sup> dengan luas 57.310,00 ha. Jumlah pohon yang ada mencapai 22.924.000 batang, dengan jumlah pohon siap

tebang sebanyak 3.230.500 batang. Perbandingan jumlah RT Petani Kehutanan tahun 2012 - 2013, sebagaimana tabel berikut<sup>8</sup> :

**Tabel 2.7**  
*Perbandingan dengan jumlah RT petani kehutanan  
Tahun 2013-2014*

No	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	% Naik/turun
1	Jml. RT Petani Kehutanan	9.921	11.558	17
2	Jml. Kelompok Tani Kehutanan	134	135	0,75

*Sumber : Dinas Kehutanan Kab. Lumajang Tahun 2013*

Untuk jumlah pengusaha kehutanan sampai dengan tahun 2013 dapat dibandingkan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.8**  
*Perbandingan Jumlah Pengusaha Kehutanan  
Tahun 2014-2015*

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	% Naik/turun
1	Jml pengusaha pengolahan hasil hutan yang terdaftar	50	71	42
2	Jml penangkar bibit swadaya	86	86	0

*Sumber : Dinas Kehutanan Kab. Lumajang Tahun 2013*

---

<sup>8</sup> Ibid hal II-64

Penanganan lahan kritis selama tahun 2013 berupa penambahan luasan hutan rakyat dan reboisasi ditaksir dapat mengurangi jumlah luasan areal lahan kritis sebanyak 415,40 ha atau 2,84 persen dari luas lahan kritis hasil inventarisasi BPDAS Sampean Bondowoso tahun 2012 yaitu 14.627,60 ha. Sehingga Luas lahan kritis yang belum tertangani di akhir tahun 2013 sebesar 14.212,20 ha yang terdiri dari lahan kritis dalam kawasan hutan seluas 6.680,78 ha dan di luar kawasan seluas 7.531,42 ha. Keberhasilan ini disebabkan karena berhasilnya kegiatan penghijauan dan reboisasi pada lahan-lahan kritis, baik yang dilaksanakan melalui kegiatan Dinas Kehutanan, Perum Perhutani, dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Kabupaten Lumajang maupun swadaya masyarakat.

## **B. Gunung Semeru**

### **1. Gunung Semeru**

**Gunung Semeru** atau **Sumeru** adalah sebuah gunung berapi kerucut di Jawa Timur, Indonesia. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa, dengan puncaknya *Mahameru*, 3.676 meter dari permukaan laut (mdpl). Gunung Semeru juga merupakan gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia setelah Gunung Kerinci di Sumatera dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Kawah di puncak Gunung Semeru dikenal dengan nama *Jonggring Saloko*. Gunung Semeru secara administratif termasuk dalam wilayah

dua kabupaten, yakni Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.

**Gambar 2.1**  
*Gunung Semeru*



Gunung ini termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Semeru mempunyai kawasan hutan *Dipterokarp Bukit*, hutan *Dipterokarp Atas*, hutan *Montane*, dan *Hutan Ericaceous* atau hutan gunung. Posisi geografis Semeru terletak antara 8°06' LS dan 112°55' BT. Pada tahun 1913 dan 1946 Kawah Jonggring Saloka memiliki kubah dengan ketinggian 3.744,8 m hingga akhir November 1973. Disebelah selatan, kubah ini mendobrak tepi kawah menyebabkan aliran lava mengarah ke sisi selatan meliputi daerah Pronojiwo dan Candipuro di Lumajang<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung\\_Semeru#Iklim](https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Semeru#Iklim) di akses tanggal 29 april 2016 pukul 08.15

## 2. Iklim Gunung Semeru

Secara umum iklim di wilayah gunung Semeru termasuk type iklim B (*Schmidt* dan *Ferguson*) dengan curah hujan 927 mm - 5.498 mm per tahun dengan jumlah hari hujan 136 hari/tahun dan musim hujan jatuh pada bulan November - April. Suhu udara dipuncak Semeru berkisar antara 0 - 4 derajat celsius.

Suhu rata-rata berkisar antara 3°C - 8°C pada malam dan dini hari, sedangkan pada siang hari berkisar antara 15°C - 21°C. Kadang-kadang pada beberapa daerah terjadi hujan salju kecil yang terjadi pada saat perubahan musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya. Suhu yang dingin disepanjang rute perjalanan ini bukan semata-mata disebabkan oleh udara diam tetapi didukung oleh kencangnya angin yang berhembus ke daerah ini menyebabkan udara semakin dingin.

Di puncak Gunung Semeru (Puncak Mahameru) disarankan untuk tidak menuju kawah Jonggring Saloko, juga dilarang dari sisi sebelah selatan, karena adanya gas beracun dan aliran lahar. Gas beracun ini dikenal dengan sebutan *Wedhus Gembel* (Bahasa Jawa yang berarti "kambing gimbal", yakni kambing yang berbulu seperti rambut gimbal) oleh penduduk setempat. Suhu dipuncak Mahameru berkisar 4-10 derajat Celsius, pada puncak musim kemarau minus 0 derajat Celsius, dan dijumpai kristal-kristal es. Cuaca sering berkabut terutama pada siang, sore dan malam hari. Angin bertiup kencang, pada bulan Desember-Januari sering ada

badai. Terjadi letusan Wedus Gembel setiap 15-30 menit pada puncak gunung Semeru yang masih aktif. Pada bulan November 1997 Gunung Semeru meletus sebanyak 2990 kali. Siang hari arah angin menuju puncak, untuk itu hindari datang siang hari di puncak, karena gas beracun dan letusan mengarah ke puncak. Letusan berupa asap putih, kelabu sampai hitam dengan tinggi letusan 300-800 meter. Material yang keluar pada setiap letusan berupa abu, pasir, kerikil, bahkan batu-batu panas menyala yang sangat berbahaya apabila pendaki terlalu dekat.

Pada awal tahun 1994 lahar panas mengalir lereng selatan Gunung Semeru dan telah memakan beberapa korban jiwa, walaupun pemandangan sungai panas yang berkelok-kelok menuju ke laut ini menjadi tontonan yang sangat menarik.

Soe Hok Gie, salah seorang tokoh aktivis Indonesia dan mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia, meninggal di Gunung Semeru pada tahun 1969 akibat menghirup asap beracun di Gunung Semeru. Dia meninggal bersama rekannya, Idhan Dhanyantari Lubis<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung\\_Semeru#Iklim](https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Semeru#Iklim) diakses pada tanggal 29 april 2016 pukul 08.25

## **C. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru**

### **1. Profil Organisasi**

#### **A. Risalah Kawasan**

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ( TNBTS ) di tunjuk melalui pernyataan Menteri Pertanian No.736/Mantan/X/82 tanggal 14 Oktober 1982, Cagar Alam Laut Pasir Seluas 5.247,53 Hektar, Cagar Alam Ranu Kumbolo seluas 1.403 hektar, Taman Wisata Laut Pasir Tengger seluas 2,67 Hektar, Taman Wisata Ranu Pane dan Ranu Regulo seluas 96 Hektar, Taman Wisata Darungan Seluas 380 Hektar, Hutan Lindung dan Hutan Produksi terbatas Seluas 43.210 hektar telah dinyatakan sebagai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah di tata batas temu gelang seluas 50.276,20 ha berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Batas Hutan tanggal 22 September 1986 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan tanggal 8 November 1993.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru selanjutnya di tunjuk kembali melalui Keputusan Menteri Kehutanan No.278/Kpts-VI/1997 tanggal 23 Mei 1997 seluas 50.276,3 ha, terdiri dari dataran seluas 50.266,05 ha dan perairan ( danau ) seluas 10,25 ha. Pada Tahun 2005 Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Kehutanan No.178/Menhut-II/2005 tanggal 29 Juni

2005 seluas 50.276,20 ha<sup>11</sup> yang meliputi wilayah 4 Kabupaten, yaitu Kabupaten Probolinggo (3.600,37 ha ), Pasuruan (4.642,52 ha), Malang (18.692,96 ha), dan Lumajang (23.340,35 ha).

***Gambar 2.2***

***Kawasan Konservasi Gunung Semeru***



Zonasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah disahkan berdasarkan SK Dirjen PHPA No. 68/Kpts/DJ-VI/1998 tanggal 4 Mei 1998, zonasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan Tahun 2013 telah dilakukan revisi zonasi. Perbedaan zonasi lama tahun 1998 dengan zonasi tahun 2013 tertera pada tabel. Sementara dokumen rencana pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah disahkan tahun 1995 yang berlaku hingga tahun 2020 dan telah dilakukan revisi 2 kali yaitu tahun 1998 dan tahun 2014<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Statistik Balai Besar Taman Nasional Tahun 2015, Malang, 2015. hal 1

<sup>12</sup> Rencana Strategis Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Tahun 2015 – 2019, Malang, 2015. Hal 1

**Tabel 2.9***Luas Zona Taman Nasional Bromo Tengger Semeru*

<b>No</b>	<b>Zona</b>	<b>Lama</b>	<b>%</b>	<b>Baru</b>	<b>%</b>
1	Inti	22.006	43,77	17.285,39	34,38
2	Rimba	23.485,2	46,71	26.932,91	53,57
3	Pemanfaatan	425	0,85	689,64	1,37
4	Rehabilitasi	2.000	3,98	1.946,09	3,87
5	Religi			29,26	0,06
6	Tradisional	2.360	4,69	3.367,58	6,7
7	khusus			25,33	0,05
	<b>Jumlah</b>	50.276,2		50,276,2	

*Sumber : Rencana Strategis Tahun 2015-2019 TNBTS*

#### **D. Asas Pokok Dan Fungsi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru**

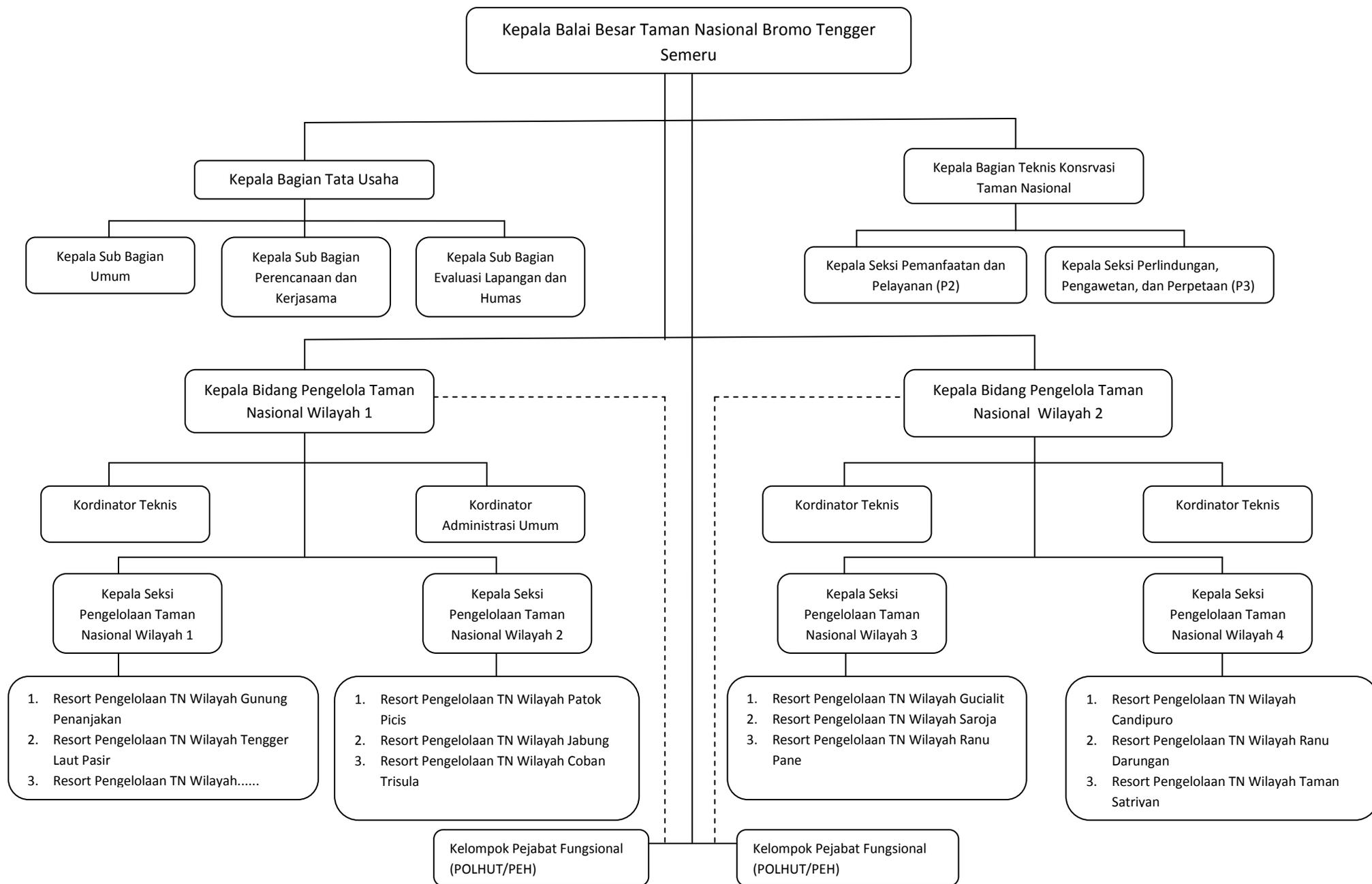
Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru melakukan penyelenggaraan Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan taman nasional (TNBTS) berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menyelenggarakan fungsi :

1. Penataan zonasi, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan Kawasan Taman Nasional.
2. Pengelolaan Kawasan Taman Nasional
3. Penyidikan, perlindungan dan pengamanan Kawasan Taman Nasional.

4. Pengendalian Kebakaran Hutan.
5. Promosi, Informasi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
6. Pengembangan Bina Cinta Alam Serta Penyuluhan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
7. Kerja Sama Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Serta Pengembangan Kemitraan.
8. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Taman Nasional.
9. Pengembangan Dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Dan Pariwisata Alam
10. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga.

#### **E. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.03/Menhut II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang organisasi dan Tata Kerja UPT Taman Nasional, struktur organisasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Terdiri dari :



**Tabel 2.10***Pembagian Wilayah Pengelolaan Taman Nasional*

<b>BIDANG PENGELOLAAN TN WILAYAH I WONOREJO PASURUAN</b>
<b>Seksi pengelolaan TN (SPTN) Wilayah I</b> <b>Cemorolawang, Probolinggo</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resort Gunung Penanjakan</li> <li>2. Resort Tenggel Laut Pasir</li> <li>3. Resort Sumber</li> </ol>
<b>Seksi Pengelolaan TN (SPTN) Wilayah II</b> <b>Tumpang, Malang</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Resort Jabung</li> <li>5. Resort Coban Trisula</li> <li>6. Resort Patok Picis</li> </ol>
<b>BIDANG PENGELOLA TN WILAYAH II PURWOREJO – LUMAJANG</b>
<b>Seksi Pengelolaan TN (SPTN) Wilayah III</b> <b>Purworejo – Lumajang</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Resort Gucialit</li> <li>8. Resort Seroja</li> <li>9. Resort Ranupani</li> </ol>
<b>Seksi Pengelolaan TN (SPTN) Wilayah IV</b> <b>Purworejo – Lumajang</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Resort Candipuro</li> <li>11. Resort Ranu Farungan</li> <li>12. Resort Taman Satriyan</li> </ol>

*Sumber : Rencana Strategis Tahun 2015-2019 TNBTS*

#### D. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sampai tahun 2014 berjumlah 113 orang, dengan pegawai struktural sebanyak 14 orang, non-struktural 57 orang, dan pegawai fungsional sebanyak 47 orang yang terbagi atas 25 orang polisi hutan, 4 orang penyuluh, dan 16 orang Pengendali Ekosistem Hutan ( PEH ). Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebagian besar memiliki tingkat pendidikan dan S1<sup>13</sup>.

**Tabel 2.11**

*Tingkat Pendidikan Pegawai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru*

NO	Tahun	Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SMA	SLTP	SD	
1	2010	0	7	26	6	60	7	5	111
2	2011	0	6	26	6	59	7	5	109
3	2012	1	6	29	6	57	7	5	111
4	2013	1	4	25	6	56	6	4	102
5	2014	1	6	33	8	54	6	5	113

*Sumber : Rencana Strategis Tahun 2015-2019 TNBTS*

<sup>13</sup> Ibid hal 3

## 2. Pendanaan

Pendanaan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru selama Tahun 2010-2014 menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 9,63 % dengan rata rata anggaran pertahun sebesar Rp.14.798.394.200,00. Penggunaan anggaran tersebut meliputi 37,19% untuk belanja modal dan barang. Alokasi anggaran tersebut menunjukkan komitmen pengelola dalam pengelolaan kawasan. Sementara pendapatan Negara Bukan Pajak ( PNB ) selama periode 2010-2014 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 4.902.426.210,00 selengkapnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini<sup>14</sup>.

**Tabel 2.12**

*Pendanaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru selama periode tahun 2010-2014*

Tahun	Anggaran	Kenaikan Anggaran (%)	PNPB	Kenaikan PNB	Presentase PNB terhadap Anggaran (%)	Presentase Penggunaan Anggaran (%)	
	(Rp)		(Rp)			(%)	Belanja Pegawai
2010	11.697.034.000,00		1.061.918.760,00		9,08	37,9	62,1
2011	12.045.646.000,00	2,98	880.519.840,00	-21	7,31	41,8	58,2
2012	13.993.805.000,00	16,17	1.534.762.050,00	43	10,97	39,2	60,8
2013	20.077.614.000,00	43,48	5.863.733.900,00	74	29,21	30,2	69,8
2014	16.177.872.000,00	-24,11	15.171.196.500,00	61	93,77	36,8	63,2
<b>Jumlah</b>	<b>73.991.971.000,00</b>		<b>24.512.131.050,00</b>				
<b>Rata-rata</b>	<b>14,798.394.200,00</b>	<b>9,03</b>	<b>4.902.426.210,00</b>	<b>39</b>	<b>30,07</b>	<b>37,19</b>	<b>62,81</b>

Sumber : Rencana Strategis Tahun 2015-2019 TNBTS

<sup>14</sup> Ibid hal 4

### **A. Menjadi pengelola keuangan badan layanan umum**

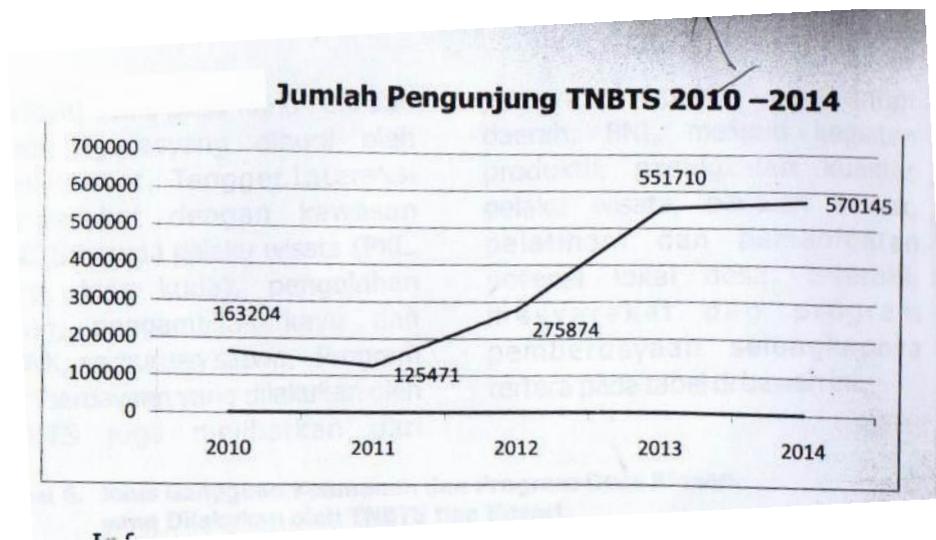
Keterbatasan pendanaan dalam pengelolaan taman nasional yang selama ini dianggap sebagai *cost center* pada satu sisi dan di sisi lain potensi sumber daya alam yang besar untuk dikembangkan mendorong adanya konsep taman nasional mandiri. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan konsep tersebut adalah mendorong perubahan kelembagaan taman nasional menjadi badan layanan umum (BLU). Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan salah satu UPT yang dipersiapkan menjadi pengelola keuangan badan layanan umum (PK-BLU). Upaya yang telah dilakukan oleh BBTNBS adalah melakukan finalisasi dokumen, peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pelatihan, penataan dan pemantapan kelembagaan dan sarana prasarana, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian keuangan. Oleh karena implementasi konsep BLU ini sangat tergantung pada kebijakan pusat/ditjen PHKA yang sampai saat ini belum nampak implementasinya.

### **B. Pengelola wisata alam**

Pemanfaatan jasa lingkungan dikawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang paling menonjol adalah wisata alam. Pengelolaan wisata alam yang dilakukan diantaranya, yaitu pengembangan wisata alam, Monitoring dampak lingkungan wisata alam, pembangunan sarana dan prasarana, Monitoring jumlah pengunjung, penataan dan koordinasi kelompok masyarakat pelaku wisata. Obyek wisata yang menjadi pusat-

pusat kunjungan unggulan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru meliputi gunung bromo, penanjakan, cemoro lawang, laut pasir, pendakian gunung semeru yang melewati ranu kumbolo. Jumlah pengunjung tahun 2010 -2014 rata-rata 330.280 orang pertahun dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 19% per tahun seperti tertera pada grafik di bawah ini.

**Gambar 2.13**  
*Jumlah Pengunjung*



Informasi pengelolaan wisata yang tersedia masih terbatas pada jumlah pengunjung dan pendapatan. Sementara informasi terkait perilaku/aktivitas wisatawan, dampak wisata terhadap kawasan/daya dukung, jumlah masyarakat yang terlibat dan dampak sosial-budaya dan ekonomi masih terbatas. Bentuk wisata yang berkembang saat umumnya wisata massal dengan presentase 75% dari total jumlah pengunjung. Hanya 25% pengunjung dengan tujuan tertentu misalnya pendidikan dan penelitian atau termasuk kategori ekowisata. Upaya menjadikan wisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebagai sarana penyadaran

lingkungan (menjadi tantangan) tidak sekedar kegiatan rekreatif menjadi tantangan pengelolaan ke depan.

### **C. Pengelolaan Berbasis *Resort***

*Resort* sebagai unit pengelolaan terkecil di taman nasional memiliki peran strategis yang langsung bersentuhan dengan kawasan dan masyarakat. Seluruh informasi terkait potensi dan permasalahan kawasan semestinya tergambar pada masing-masing *resort*. Pengelolaan berbasis *resort* di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sudah dilaksanakan namun masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas SDM pengelola data *base*, pengembangan sistem Monitoring dan pelaporan, penyusunan rencana kerja. Pengelolaan berbasis *resort*. Basis data potensi dan masalah di 12 *resort* belum terkelola dengan baik. Kualitas SDM, keterbatasan pendanaan dan sarana prasarana menjadi faktor *resort based management* (RBM) pengelolaan *resort* ke depan diharapkan berperan sebagai unit manajemen terkecil yang mampu menyediakan data yg valid tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, tersedia dan terkelolanya dana operasional.

### **D. Pemberdayaan masyarakat**

Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di 4 (empat) kabupaten, yaitu kab. Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang. Terdiri atas 3 kecamatan (9 desa) di kab. Probolinggo, 4 kecamatan (12

desa) di kab. Pasuruan, 5 kecamatan (22 desa) di kab. Lumajang dan 6 kecamatan (25 desa) di kabupaten malang diantara 68 desa tersebut, terdapat 2 desa yang berada di dalam kawasan (desa *enclave*) yakni desa ranu pani dan desa Ngada yang dihuni oleh masyarakat Tengger. Interaksi masyarakat dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru berupa pelaku wisata (PKL, *JEEP*, jasa Kuda) pengolahan lahan, pengambilan kayu dan HHNK, perburuan satwa. Program pemberdayaan yang dilakukan oleh Taman Nasional Bromo Tengger Semeru juga melibatkan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNI, meliputi kegiatan produktif, peningkatan kualitas pelaku wisata, bantuan ternak, pelatihan, dan pemanfaatan potensi lokal desa. Interaksi masyarakat dan program pemberdayaan selengkapnya tertera pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.14**

*Program Perberdayaan masyarakat*

No	Unit Kerja (Resort)	Potensi Gangguan	Jenis Program Desan Binaan
1	Resort PTN Wil. Gn. Penajakan	Pencurian kayu, pembakaran hutan, perambahan hutan, perburuan satwa liar, penanaman ganja, pembuatan arang.	Bantuan ternak kambing, pembuatan tungku hemat energi, bantuan perlengkapan homestay dari Dinas Pariwisata, pembinaan paguyuban <i>jeep</i> , bantua modal dari BNI.
2	Resort PTN	Pencurian kayu bakar,	Bantuan pengolah kripik

	Wil. Tengger Laut Pasir	pencurian HHNK, kebakaran hutan, perburuan satwa liar, pembuatan arang, pedagang kaki lima liar, sampah, pelanggaran batas lokasi wisata.	kentang, MDK Ngadisari (kegiatan koperasi), bantuan peralatan dan pelatihan pembuatan sirup belanda, bantuan heater untuk pemilik homestay, bantuan 1milyar untuk masyarakat tengger dari presiden, fasilitas kantong kotoran kuda (paguyuban kuda), bantuan sosial untuk desa ngadirejo paska gunung meletus berupa penanaman menggunakan polybag untuk tanaman pertanian yang rusak dan bantuan alat SPKP.
3	Resort PTN Wil. Sumber	Pencurian kayu, pencurian HHNK (banmbu), pencurian kayu bakar, perburuan satwa liar, perambahan kawasan hutan,	
4	Resort PTN Wil. Jabung	Pencurian kayu bakar, perambahan kawasan hutan, pencurian HHNK (bambu), perburuan satwa liar.	Bantuan Budidaya anggrek, bantuan ternak kambing, perberdayaan lebah madu, bantuan tungku hemat energi, pembinaan MMP, instalasi

			biogas, dengan paramitra mengampanyekan bangga melestarikan alam di sekolah dan bantuan bibit.
5	Resort PTN Wil. Coban Trisula	Pencurian kayu, pencurian HHNK, perburuan satwa liar, perambahan kawasan Hutan, kebakaran Hutan, pembuatan arang, pedagang kaki lima	Pelatihan pembuatan instalasi biogas dan tungku hemat energi, bantuan ternak sapi, pengembangan usaha kripik buah, bantuan mesin kripik, program padat karya, pengolahan jamu dan pembinaan MPA (masyarakat peduli api)
6	Resort PTN Wil. Patok Picis	Pencurian kayu, perencekan, pencurian HHNK ( bambu, rebung, tanaman obat) perburuan satwa liar, penambangan pasir, kebakaran hutan,	Bantuan ternak bebek
7	Resort PTN Wil. Gucialit	Pencurian kayu bakar, pencurian HHNK atau rumput, perambahan kawasan, pembukaan jalan, perburuan satwa liar, pemanfaatan air ilegal	Pengembangan jamur tiram untuk MDK, bantuan ternak kambing, bantuan bibit jeruk nipis, pelatihan pengolahan limbah plastik, bantuan modal dari Dinas Propinsi 8,5jt
8	Resort PTN	Perambahan atau	Bantuan bibit durian

	Wil. Seroja	bibirkan, pencurian kayu bakar, pengembalaan ternak, pencurian HHNK (bambu, rebung, rumput), pemanfaatan air ilegal di sungai ireng ireng oleh PDAM Lumajang, kebakaran hutan, perburuan satwa liar, pembuatan arang.	montong dan petai, bantuan ternak kambing, pembinaan MPA, Pamswakarsa pelatihan pembuatan biogas, bantuan kotak lebah madu, pelatihan budi daya lebah madu, kegiatan belajar antar desa dengan tema desa wisata kesaranga dan Yogyakarta, bantuan bibit salak madu, bantuan bibit jahe, merah dari dinas provinsi, bantuan bibit kapulaga, sumbangan polybag, untuk penanaman kayu pasang dan cemara, serta pelatihan pengolahan limbah plastik.
9	Resort PTN Wil. Ranu Pani	Pencurian kayu untuk penghangat, perburuan liar, pencurian HHNK, Kebakaran Hutan, sampah pengunjung.	Masyarakat peduli Api (MPA), Pamwakarsa, Pendampingan kelompok paguyuban porter, taruna wisata, dan pembuatan gerbang desa wisata
10	Resort wil. Taman satriyan	Perambahan kawasan hutan, penambangan pasir ilegal, pencurian	Bantuan ternak kambing dan pelatihan biogas

		HHNK (pakis), pencurian kayu, pencurian kayu bakar, perburuan satwa liar.	
11	Resort PTN Wil. Ranu Darungan	Perambahan kawasan hutan (kaliandra), pencurian kayu bakar, pencurian HHNK (Anggrek), perburuan satwa liar	Bantuan stup lebah, instalasi biogas, budi daya lebah madu (pemkab), budi daya anggrek, dan bantuan alat untuk SPKP
12	Resort PTN Wil. Candipuro	Perambahan/birikan, pencurian kayu bakar, pencurian kayu, pencurian HHNK ( bambu, rebung, rumput) pemburuan satwa liar, pembuatan arang	Bantuan bibit durian montong dan pembinaan pamswakarsa.

Sumber: Statistik TNBTS 2010 dan 2014

#### E. Kerusakan Hutan Akibat Pendaki

No	Unit Kerja (Resort)	kerusakan	Faktor	Tahun	Zonasi
1	Resort PTN Wil II Ranupani	Kebakaran hutan, 15 H	Api Unggun	2014	Jalur pendakian
2		Ladang edelwise	Dipetik	2014	Sabana edelwise 2.708

					MDPL
3		Sampah	Buang sampah sembarangan	2015	Ranu kumbolo, Kali mati
4		Kebakaran Hutan 5 H	Putung rokok	2015	Jalur pendakian
5		Pencmaran danau	Buang sampah di danau	2015	Ranu regulo, ranu pani, ranu kumbolo

